

KONTRIBUSI PAJAK PENGELOLAAN AIR TANAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MALANG (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang)

Wendy Dwi Saputra, Choirul Saleh, Abdul Wachid

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya

Email:-

Abstract: *One post source revenue (PAD) in the Revenue and Expenditure (Budget) is a local tax. Local taxes is mandatory dues paid by the individual or entity to the government without compensation that will direct those dues are used to fund the implementation of the local government. Withholding tax is the most potent alternative to increase state revenues. This is because the tax has a relatively stable number. Besides local tax reflects the community's active participation in the implementation of government finance daearh. The research method used in this paper is a descriptive qualitative research methods. The results of the study showed the implementation of local regulations is not run according to plan. The results of the study consisted of several points of view including the basic measures and policy objectives, implementing organizations, policy goals, implementation activities, the relationship between the implementing agency. From the results of the study researchers gave some suggestions include improving the quality and quantity of personnel in the implementation of groundwater management policies. There needs to be good communication between the Integrated Services Licensing Unit Malang with the management of ground water in this case is the applicant groundwater management.*

Keywords : *Groundwater tax contribution to revenue Malang regency*

Abstrak: *Salah satu pos sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan peraturan daerah ini kurang berjalan sesuai dengan rencana. Hasil dari penelitian terdiri dari beberapa sudut pandang diantaranya adalah Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, organisasi pelaksana, sasaran kebijakan, kegiatan-kegiatan pelaksanaan, hubungan antar lembaga pelaksana. Dari hasil penelitian peneliti memberikan beberapa saran antara lain meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam implementasi kebijakan pengelolaan air tanah. Perlu adanya komunikasi yang baik antar Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang dengan pihak pengelola air tanah dalam hal ini adalah pemohon ijin pengelolaan air tanah.*

Kata kunci: *Kontribusi pajak air tanah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Malang*

Pendahuluan

Pengelolaan pemerintahan daerah di Indonesia memasuki babak baru seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah jo UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah jo

UU No. 33 tahun 2004, pemerintah pusat mencoba meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya, yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain. Kewenangan yang begitu luas tentunya akan membawa dampak-dampak tertentu bagi daerah untuk menjalankan kewenangannya itu. Salah satunya adalah bahwa daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangannya. Untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan tersebut ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara. Mengingat tidak semua sumber pembiayaan diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditetapkannya paket Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memberi peluang kepada daerah untuk menggali potensi lokal penerimaan daerah dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dalam melaksanakan desentralisasi memiliki penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Khusus untuk penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah

bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu pos sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pemungutan pajak di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu usaha untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah untuk pembangunan adalah meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada di masing-masing daerah melalui pajak daerah. Pajak daerah yang diambil pemerintahan kabupaten Malang salah satunya adalah pajak perizinan pengelolaan air tanah.

Tinjauan Pustaka

Kebijakan publik sesuai yang dikemukakan oleh Dye adalah *"Public policy is whatever governments choose to do or not to do"* (Soenarko, 2000, h3). Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa apa yang diputuskan oleh Pemerintah untuk dilakukan atau dilakukannya, itulah yang merupakan *Public Policy* atau kebijaksanaan Pemerintah. Menurut Easton dalam Islamy (1997, h19), memberikan arti kebijakan negara sebagai *"The authoritative allocation of values for the whole society"* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat). Berdasarkan definisi ini, David Easton menegaskan bahwa "pemerintahlah yang secara sah dapat berbuat sesuatu terhadap

masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat”. Tindakan pengalokasian nilai ini dapat disebut tindakan yang memaksa. Menurut pendapat Anderson dalam Islamy (2004,h19) mendefinisikan “kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintahan”. Dalam kebijakan Aderson tersebut dapat membuat implikasi yaitu kebijakan mempunyai tujuan tertentu yang berorientasi pada tujuan tertentu, tindakan tersebut dapat bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Implementasi kebijakan adalah mekanisme penjabaran sebuah keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi lebih dari itu, implementasi adalah menyangkut masalah keputusan dan siapa yang memperoleh apa. Maka tidak salah jika dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari proses kebijakan. Van Meter dalam Wahab (2004,h65) merumuskan “proses implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan sebelumnya”. Implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan di dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Van Meter memiliki pandangan mengenai model implementasi bahwasanya didalam sebuah implementasi itu terdapat perbedaan-perbedaan yang mana perbedaan itu akan sangat dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan. Kedua ahli ini juga menegaskan bahwasanya ada tiga poin penting yang merupakan konsep dalam sebuah implementasi yaitu adanya perubahan,kontrol, dan kepatuhan dalam bertindak. Model implementasi Pada model ini implementasi kebijaksanaan dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi

konsep-konsep seperti: perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak. Hal lain yang dikemukakan oleh kedua ahli tersebut ialah hubungan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja yang dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel bebas seperti :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksanaan
4. Komunikasi antar organisasi terkait dalam kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Wahab (1997,h71).

Menurut Hogwood dan Gunn dalam Abdul Wahab (2004,h61-62), Setiap implementasi kebijakan tentunya mengandung resiko kegagalan telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) dalam dua kategori, yakni:

- a. *Non-implementation* (tidak terimplementasikan), artinya bahwa suatu kebijaksanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama,atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan.
- b. *Unsuccessful implementation* (implementasi tidak berhasil), artinya manakala suatu kebijaksanaan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang ternyata tidak menguntungkan, maka kebijaksanaan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijaksanaan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan faktor-faktor berikut: pelaksanaannya yang buruk (*bad execution*), kebijakan sendiri memang jelek (*bad policy*) dan kebijakan itu bernasib jelek (*bad luck*). Selain faktor penghambat pelaksanaan kebijakan, juga terdapat faktor-faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, yang oleh Anderson dalam Islamy (2004,h108-110), dijelaskan sebagai berikut: penyebab anggota

masyarakat melaksanakan suatu kebijakan diantaranya: 1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah. 2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan. 3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional dan dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan. 4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan-kebijakan kontroversial yang lebih banyak mendapatkan penolakan warga masyarakat dalam pengimplementasian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif di mana yang akan diambil berupa kata-kata dan mengamati perilaku masyarakat dan *stakeholder* lainnya terkait dengan kontribusi pajak pengelolaan Air tanah terhadap pendapatan asli daerah agar mendapat data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah di mana peneliti langsung mengambil data pada sumber data dan peneliti merupakan instrument kunci. "Data yang dihasilkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah data yang berupa kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka" (Sugiyono, 2009, h9-10).

Hasil dan Pembahasan

1. Kontribusi pengelolaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Malang

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan kebijakan

Dalam pandangan Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008, 142) "kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosial kultur budaya yang ada pada pelaksana kebijakan". Bagaimanana jika sebuah kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik jika ukuran-ukuran dasar kebijakan hanyalah sebuah wacana yang kurang bisa memenuhi harapan serta

keinginan masyarakatnya. Sebaliknya jika kebijakan tersebut terlalu ideal bahkan sempurna untuk ukuran sebuah kebijakan.

Maka besar kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Karena sebuah kebijakan yang sempurna maka nanti menuntut hasil yang sempurna juga. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada sebuah kebijakan yang sempurna. Sebuah kebijakan tidak bisa terlepas dari faktor penghambat dalam sebuah kebijakan yang bersifat kondisional. Meskipun faktor penghambat tersebut dapat diperkirakan namun tetap ada saja faktor tak terduga yang menyebabkan kebijakan tersebut terhambat. Karena setiap pelaksanaan kebijakan terdapat berbagai kepentingan yang bersaing dalam kebijakan tersebut. Beberapa pelaksanaan kebijakan dapat dukungan para pelaksana kebijakan, namun beberapa yang lain juga mendapat tentangan dari para pelaksana kebijakan.

Dalam ukuran – ukuran dasar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah 2009 diharapkan mampu melindungi keadaan lingkungan yang khususnya dalam pengelolaan air tanah atau pengeboran air tanah, yang menjadi ukuran dasar dari kebijakan ini adalah pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air tanah yang tepat guna dan tepat sasaran. Tujuan peraturan daerah ini selain mengatur serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan air tanah. Maka jika dianalisis kebijakan ini telah sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Malang yang saat ini membutuhkan keadaan lingkungan alam sekitar yang seimbang dengan pembangunan.

Dengan adanya peraturan daerah ini masyarakat tidak perlu khawatir terjadi apa-apa. Misalnya keadaan lingkungan menjadi rusak karena air tanah menjadi kering kerontang. Karena dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah bila seseorang ingin mengelola air tanah maka syarat yang diajukan salah satunya. Syaratnya adalah setiap Perorangan dan badan usaha yang mengajukan Izin Pemakaian Air Tanah atau Izin Pengusahaan Air Tanah harus melaksanakan pengujian pompa (pumping

test) guna mengukur kemampuan sumur yang diambil air tanahnya (Pasal 15 ayat 1). Hal ini bertujuan menjaga keadaan air tanah tersebut. Dalam peraturan daerah untuk pihak pengelola jika ingin mengelola air tanah juga disyaratkan untuk apa pengelolaan air tanah tersebut, selain itu memberikan kontribusi dengan berkewajiban membayar pajak (Pasal 10 ayat 1,2,3). Sehingga pihak masyarakat tidak perlu khawatir jika peruntukan air tanah tidak sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu masyarakat mendapat timbal balik atas pembayaran pajak pihak pengelola air tanah.

b. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dalam Agustino (2008,h29) membagi pelaku kebijakan menjadi dua yaitu pejabat pembuat dan partisipan non pemerintah dalam pembuat kebijakan. Pejabat pembuat kebijakan adalah orang – orang yang berwenang dan ikut serta dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian partisipan non pemerintah dalam pembuat kebijakan dapat diwakili oleh kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara.

Elemen ini penting dan dominan dalam kondisi yang berlainan, meskipun secara legal mereka tidak mempunyai kekuasaan untuk membuat kebijakan. Dalam hal ini dinas-dinas bertindak sebagai pembuat kebijakan yang tergabung dalam tim teknis diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan selaku koodinator kemudian anggotanya adalah Dinas Energi Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan. Dinas –dinas inilah yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat sebuah kebijakan. Partisipan non pemerintah dalam kebijakan ini adalah pengelola air tanah di Kabupaten Malang. Peran mereka dalam pelaksanaan kebijakan adalah sebagai sasaran kebijakan.

Namun dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 ini, masing – masing dinas yang tergabung dalam tim teknis masing sering beda kebijakan dari masing – masing dinas tersebut. Belum adanya koodinasi yang baik antar dinas yang

tergabung dalam tim teknis tersebut menyebabkan proses pelayanan perizinan menjadi tertunda. Hal ini sangat disayangkan, mengingat jika koordinasi berjalan baik akan mengefisienkan kinerja dinas yang tergabung dalam tim teknis. Selain itu pengelola air tanah tidak perlu mondar mandir memenuhi persyaratan yang berkenaan dengan perizinan pengelolaan air tanah.

c. Sasaran Kebijakan

Selain organisasi – organisasi pelaksana kebijakan bagian terpenting adalah kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah pihak pengelola air tanah. Sebagai kelompok sasaran, pelaksana kebijakan memiliki alasan mengapa mereka harus menjalankan kebijakan tersebut. Sebab – sebab kelompok sasaran harus melaksanakan kebijakan, seperti yang diungkapkan oleh Agustino (2008,h157) dibawah ini :

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya sanksi hukum
4. Adanya kepentingan publik
5. Adanya kepentingan pribadi
6. Masalah waktu

Pihak pengelola air tanah mereka melaksanakan kebijakan ini karena mereka menghargai dan memiliki kesadaran untuk menjalankan keputusan – keputusan instansi pemerintah terkait dengan pengelolaan air tanah. Karena pihak pengelola meyakini bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang baik dan berguna bagi masyarakat umum. Namun dalam kenyataannya pihak pengelola banyak melakukan pelanggaran atas pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

d. Kegiatan – kegiatan Pelaksanaan

Pelaksanaan kebijakan yang telah disajikan dalam hasil penelitian diatas. Maka seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang maupun pihak pengelola air tanah telah melalui semua kegiatan pelaksanaan kebijakan. Staffing agen baru atau menetapkan tanggung jawab pelaksanaan

kebijakan kepada personel yang ada sudah dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang, dengan menunjuk bidang kesejahteraan rakyat untuk mengurus segala bentuk perizinan pengelolaan air tanah. Sedangkan menerjemahkan maksud dan tujuan eksekutif dalam aturan operasional telah dilakukan melalui proses sosialisasi kebijakan kepada seluruh pengelola air tanah. Dengan adanya proses sosialisasi diharapkan masyarakat mengerti akan mekanisme permohonan izin dan mekanisme pemberian sanksi yang berlaku.

Untuk koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan juga telah dijalankan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini. Walaupun proses koordinasi masih ada sedikit kendala. Sehingga, proses implementasi kebijakan bukan mempersoalkan tujuan pembuatan kebijakan melainkan kontinuitas dari pembuatan kebijakan yaitu ketika sebuah kebijakan selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai. Kegiatan utama dari seluruh kebijakan ini adalah pelayanan pemberian perizinan pengelolaan air tanah. Dengan adanya perizinan diharapkan dapat tercapai tujuannya yaitu:

1. Adanya suatu kepastian hukum mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut;
2. Adanya perlindungan terhadap kepentingan – kepentingan umum;
3. Mencegah adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan;

Maka surat izin pengelolaan air tanah sebagai bukti legal atas izin pengelolaan air tanah harus dimiliki pengelola air tanah. Selain hal itu merupakan hal wajib dalam pengelolaan air tanah. Dengan memiliki izin resmi pengelolaana air tanah maka pengelola memiliki kepastian hukum mengenai pengelolaan air tanah tersebut. Surat izin pengelolaan air tanah berdasarkan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah akan melindungi kepentingan masyarakat banyak. Ketika izin dikeluarkan maka kebijakan titik mana yang cukup cadangan air tanah sebagai salah satu bentuk pencegahan kerusakan lingkungan akibat kekurangan air tanah. Dalam pelaksanaannya, segala bentuk kegiatan

yang didasarkan pada Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah ini perintah, larangan, dan kewajiban. Aturan tersebut bermakna sebagai hukum manakala dapat dipaksakan kepada setiap orang yang melakukan kesalahan yang terdapat pada aturan tersebut, yaitu berupa tindakan sanksi. Sanksi demikian sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Sanksi atas pelanggaran izin dapat berupa sanksi administrasi yaitu berupa pencabutan izin, sanksi perdata dapat berupa denda atau pidana penjara. Apabila ditemukan pelanggaran berat maka bisa dikenakan keduanya secara bersamaan.

Ketika pengeboran air tanah mengalami kesalahan baik secara administrasi dan lingkungan maka diberlakukan mekanisme pemberian sanksi sebagaimana telah dijelaskan dalam penelitian diatas. Pelanggaran – pelanggaran yang sering terjadi diantaranya adalah surat izin pengelolaan air tanah yang jatuh tempo, pajak terutang, kesalahan pada saat pengeboran,dll. Surat izin pengelolaan air tanah yang telah habis masa berlakunya tetapi tidak diperpanjang kembali akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda pajak. Selain itu jika Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) tidak segera diperpanjang maka Surat Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) akan ditarik kembali oleh pihak Unit Pelayanan Terpadu Perizinan.

e. Hubungan Antar Lembaga Pelaksana
Dijelaskan dalam sikap para pelaksana dapat mempengaruhi hubungan antar lembaga hal ini dijelaskan dalam Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2008, h144) “koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan”. Jika dikaitkan dengan teroi diatas beberapa karakteristik dari instansi pelaksana juga mempunyai pengaruh terhadap kecendrungan para personel didalamnya. Sifat jaringan kerja komunikasi, tingkat pengawasan, dan gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi identifikasi individu terhadap tujuan-tujuan organisasi pelaksana. Komunikasi diantara pelaksana yang memiliki peran dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah. Hubungan ini tidak

selamanya berjalan dengan baik sebagaimana dijelaskan dalam penelitian diatas, bahwa koordinasi dan komunikasi masih ada kendala kebijakan masing-masing dinas dan letak kantor yang terpisah antar satu dengan yang lain. Belum adanya suatu kebijakan yang mengatur komunikasi dan koordinasi diantara para pelaksana turut menjadi masalah. Kebijakan yang begitu kompleks dan rumit menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak berjalan sesuai kebijakan yang sesuai, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efisien dan menghambat jalannya kebijakan tersebut. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan seharusnya dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam kontribusi pengelolaan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah

Dalam setiap implementasi kebijakan pastinya mengandung resiko kegagalan, Hogwood dan Gun (Abdul Wahab, 2004, h60-62) salah satunya adalah *Unsuccessful Implementation*, artinya manakala suatu kebijakan tertentu dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Maka kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh beberapa factor berikut: pelaksanaan yang buruk (*bad execution*), kebijakan sendiri memang jelek (*bad policy*) dan kebijakan tersebut bernasib jelek (*bad luck*).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai faktor penghambat kebijakan dan dikaitkan dengan teori tersebut, maka kebijakan ini dapat dikatakan tidak berjalan sesuai rencana (*Unsuccessful Implementation*), karena dalam suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Maka kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal tersebut disebabkan oleh beberapa factor

berikut: pelaksanaan yang buruk (*bad execution*). Ketidaksiapan para pelaksana kebijakan menyebabkan kebijakan ini masih perlu perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan. Karena selain banyak pihak yang belum paham sepenuhnya mengenai ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Kabupaten Malang mengenai Tentang Pengelolaan Air Tanah, pengelola air tanah khususnya masyarakat luas sebagai pihak yang juga termasuk dalam kelompok sasaran kebijakan. Juga masih banyak regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh masing-masing Dinas yang mengurus urusan perijinan pengelolaan air tanah yang masih belum saling mendukung antara satu dan yang lainnya. Padahal jika saja kebijakan-kebijakan mereka berdasarkan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 ini mungkin saja hal tersebut tidak akan mempengaruhi pengelola air tanah sebagai sasaran kebijakan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian- uraian yang peneliti kemukakan diatas pada bab – bab sebelumnya maka pada bab ini mencoba mengambil kesimpulan dari penelitian yang peneliti amati serta memberikan saran dan masukan sebagai bab terakhir dalam skripsi ini

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam ukuran – ukuran dasar pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah 2009 diharapkan mampu melindungi keadaan lingkungan yang khususnya dalam pengelolaan air tanah atau pengeboran air tanah, yang menjadi ukuran dasar dari kebijakan ini adalah pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan pengelolaan air tanah yang tepat guna dan tepat sasaran. Organisasi pelaksana atas implementasi kebijakan pengelolaan air tanah terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang tergabung dalam tim teknis. Dalam hal ini dinas-dinas bertindak sebagai pembuat kebijakan yang tergabung dalam tim teknis diantaranya Unit Pelayanan Terpadu Perizinan selaku koodinator kemudian anggotanya adalah Dinas Energi

Sumber Daya Mineral, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan. Selain organisasi – organisasi pelaksana kebijakan bagian terpenting adalah kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Kelompok sasaran yang dimaksud adalah pihak pengelola air tanah. Sebagai kelompok sasaran, pelaksana kebijakan memiliki alasan mengapa mereka harus menjalankan kebijakan tersebut.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut: Diharapkan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang

untuk memperhatikan masalah sistem pengarsipan dan administrasi yang masih kacau maka upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat server sistem pengarsipan dan administrasi online. Diharapkan dapat diakses oleh instansi-instansi terkait bahkan oleh masyarakat umum yang berkepentingan dalam kebijakan pengelolaan air tanah. Diharapkan Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur dalam implementasi kebijakan pengelolaan air tanah. Upaya nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kemampuan aparatur dan meningkatkan jumlah aparatur yang dimiliki.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2008). **Dasar-dasar Kebijakan Publik**. Bandung: CV Alfabeta,
- Islamy, M.Irfan. (1997). **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta. Bumi Aksara.
- Islamy, M.Irfan. (2004). **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta. Bumi Aksara.
- Islamy, M.Irfan. (2007). **Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara**. Jakarta. Bumi Aksara.
- Soenarko (2000) **Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah**, Surabaya :Airlangga University Press,.
- Sugiyono. (2009). **Memahami Penelitian Kualitatif**. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. (1997). **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul.(2004). **Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: PT Bumi Aksara